



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Pejabat PMDS Bisa Terseret

Pengusutan DD Nangai Amen

PELABAI - Tidak hanya Kepala Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara Deri Cahyadi (38) yang bakal terseret hukum terkait proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Nangai Amen tahun 2018. Tetapi juga berpotensi menyeret sejumlah pejabat. Diantaranya oknum pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) Kabupaten Lebong yang mengeluarkan rekomendasi pencairan DD dan ADD Nangai Amen senilai Rp 1,07 miliar itu.

Termasuk PNS di Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah (BKD) yang juga berperan dalam proses pencairan DD dan ADD Nangai Amen. Tidak terkecuali perangkat desa, juga disinyalir terlibat. "Beberapa saksi masih akan kami periksa guna pendalami hasil pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan, red). Tidak menutup kemungkinan status para saksi itu meningkat menjadi tersangka jika memang terbukti melanggar hukum," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Endang Sudarma, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Eddy Sugandi Tahir, SH.

Dijelaskannya, pengusutan DD dan ADD Nangai Amen oleh tim Pidana Khu-

sus (Pidsus) Kejari Lebong bukan hanya karena pihak desa tidak melaporkan realisasi DD dan ADD tahap III tahun 2018. Itu hanya pintu masuk dalam rangka penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh, yakni DD dan ADD tahap I, tahap II dan tahap III. "Soalnya DD yang tengah diusut Kejari adalah pelaksanaan pembangunan jalan desa senilai Rp 608 juta," terang Eddy.

Sementara DD tahun 2018 yang belum dilaporkan hanya untuk tahap III senilai Rp 286 juta. Tentunya nilai itu tidak sesuai dengan dana yang telah digunakan untuk membangun jalan desa yang fisiknya tidak selesai. Guna memastikan indikasi penyelewengan, Eddy pastikan pihaknya akan melibatkan ahli konstruksi guna memastikan spesifikasi dan persentase pekerjaan. "Kalau dana dengan progres pekerjaan tidak klop, siap-siap saja mereka yang terlibat duduk sebagai tersangka," tandas Eddy.

Selain masalah pembangunan jalan desa, Deri juga diperiksa karena diduga tidak merealisasikan dana penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam APBDes 2018 senilai Rp 80 juta. Dana yang bersumber dari ADD itu, sesuai laporan masyarakat Desa Nangai Amen kepada Kejari tidak diserahkan Deri kepada pengurus BUMDes.(sca)